

ANALISIS KONSUMSI PANGAN TINGKAT MASYARAKAT MENDUKUNG PENCAPAIAN DIVERSIFIKASI PANGAN

Mewa Ariani¹

¹Peneliti Utama BPTP Banten

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF FOOD CONSUMPTION AT COMMUNITY LEVEL TO ACHIEVE FOOD DIVERSIFICATION

As a country with large population, having food-self-sufficiency-based-food security is very important. One of the strategies to be secured in food-self-sufficiency-based-food is through achieving food consumption diversification. This paper was aimed to analyze recent food consumption pattern in Indonesia with respect to food consumption diversification. Source of the data was National Household Socio-economic Survey (SUSENAS) year 2005-2009 obtained from the Food Security Council, Ministry of Agriculture. The data were analyzed using quantitative descriptive method and presented in tables. Results of the analyses showed that: 1) Community's welfare in Indonesia is improving, showed by reducing proportion of food expenditure; 2) Protein consumption among Indonesian people exceeds Recommended Dietary Allowance (RDA) for protein, while energy consumption is still below RDA for energy; and 3) The diversity of food consumption pattern among Indonesian people is improving, showed by increasing Dietary Diversity Score (Pola Pangan Harapan/PPH). However, to reach PPH-based food pattern, rice consumption should be limited, while consumption of tubers, animal food and fruits-vegetables still has to be increased significantly. Government created various instruments to achieve food diversification, such as Regulation of President No. 22, 2009 about Local Resources-based-Accelerating Food Consumption Diversification Policy, which further regulated by Ministry of Agriculture based on Regulation of Minister of Agriculture No. 43, 2009 about the action. Learning from past experience, simultaneous commitment and consistency from all stakeholders including legislative institution and media (newspaper, TV, radio, etc.) is important to implement. By having similar perception, right action and consistency in implementation, food diversification is no longer being a dream.

Keywords: food diversification, food consumption, community

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan penduduk besar dan wilayah sangat luas, ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik Indonesia. Menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional, wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik.

Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi dunia yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial yang ditandai: 1) Harga pangan internasional mengalami lonjakan drastis, 2) Meningkatnya kebutuhan pangan untuk energi alternatif, 3) Resesi ekonomi global yang berakibat semakin menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan; 4) Serbuan pangan asing (*westernisasi diet*) berpotensi

besar penyebab gizi lebih dan 5) Meningkatnya ketergantungan pada impor¹. Pemerintah dengan berbagai program terus berupaya untuk meningkatkan produksi pangan. Produksi komoditas tanaman pangan utama tahun 2009 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2008. produksi beras menjadi 63.840 ribu ton GKG atau meningkat 5,8 persen. Komoditas jagung, kedelai, ubikayu dan ubijalar berturut-turut sebesar 8,2 persen; 24,5 persen; 2,9 persen dan 7,7 persen. Komoditas lain seperti hortikultura juga mengalami peningkatan, seperti bawang merah sebesar 38,0 persen dan cabe sebesar 16,1 persen².

Upaya pencapaian produksi pangan kedepan tampaknya akan menemui kendala akibat adanya perubahan iklim di Indonesia. Haryono (2010), mengemukakan bahwa dampak perubahan pola hujan dan kejaian iklim ekstrim adalah antara lain peningkatan ancaman organisme pengganggu tanaman (OPT), mundurnya awal musim hujan,

kebanjiran dan kekeringan³. Akibat dari hal tersebut, risiko penurunan produksi akan bertambah dari 2,4-6 persen menjadi 10 persen jika tidak ada terobosan baru. Apalagi jumlah penduduk Indonesia pada saat ini mencapai 237,6 juta orang dan terus bertambah dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49 persen⁴. Oleh karena itu sangatlah tepat kalau salah satu target utama Kementerian Pertanian adalah program diversifikasi pangan⁵. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia dikaitkan dengan diversifikasi konsumsi pangan.

METODE PENELITIAN

Data utama yang digunakan untuk menganalisis konsumsi pangan masyarakat adalah data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diolah oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian (2010). Data yang dianalisis adalah data SUSENAS lima tahun terakhir yaitu 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009. Selain itu juga digunakan data lainnya yang terkait yang berasal dari berbagai instansi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel-tabel.

HASIL DAN BAHASAN

Ke Arah Mana Konsumsi Pangan Masyarakat?

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan pengeluaran menjadi dua kelompok yaitu pengeluaran untuk pangan dan pengeluaran non pangan. Komposisi pengeluaran rumahtangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin membaik tingkat perekonomian masyarakat (BPS, 2006). Merujuk hal tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia lima tahun terakhir semakin membaik, apalagi pada periode tahun 2007 dibandingkan tahun 2006. Sejak tahun 2008, tingkat kesejahteraan

masyarakat menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2008 adanya resesi ekonomi global dan adanya kebutuhan pangan untuk energi alternatif. Dampaknya adalah penurunan daya beli masyarakat dunia termasuk di Indonesia.

Pada data Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) terdapat 215 jenis makanan yang dikumpulkan dan dikelompokkan pada 14 kelompok untuk pangan dan 6 kelompok untuk non pangan. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras, hal ini juga dapat dilihat dari pangsa pengeluaran kelompok padi-padian yang mencapai sekitar 10 persen. Menarik disimak dengan memperhatikan pengeluaran kelompok pangan tahunan adalah sampai tahun 2005 sampai 2006, pengeluaran padi-padian masih lebih tinggi daripada kelompok makanan jadi dan sebaliknya untuk tahun-tahun berikutnya. Kecenderungan yang demikian ini sebagai indikasi telah mulai terjadi pergeseran pola makan di masyarakat yaitu dari makanan yang dimasak di rumah ke arah makanan yang dimasak di luar rumah seperti di restoran, kafe, warung tegal (warteg) dan lainnya. Gejala ini juga dapat diterjemahkan sebagai indikasi terjadinya pengurangan konsumsi beras pada masyarakat.

Penurunan daya beli masyarakat berdampak negatif pada penurunan pembelian pangan hewani dan sayur+buah. Penurunan yang mencapai hampir setengahnya pada sayur+buah perlu mendapat perhatian serius, apakah penurunan ini karena harga sayur+buah yang mahal. Atau dengan daya beli yang terbatas, masyarakat harus memprioritaskan pada kebutuhan pangan pokok yang umumnya adalah sumber karbohidrat seperti beras, sehingga tidak ada anggaran untuk membeli sayur+buah. Permasalahannya adalah sayur+buah adalah makanan yang banyak dianjurkan untuk dikonsumsi mengingat peranannya dalam kesehatan manusia sangat penting. Selama lima tahun terakhir yang konsisten meningkat adalah pangsa pengeluaran makanan dan minuman jadi, yaitu dari 10,4 persen tahun 2005 menjadi 12,6 persen tahun 2009.

Tabel 1
Perkembangan Pengeluaran Masyarakat Per Kapita/Bulan (%)

Kelompok Pengeluaran	2005	2006	2007	2008	2009
Pangan	53,9	53,0	49,2	50,2	50,6
Padi-padian	9,6	11,4	10,2	9,6	8,9
Daging+telur+susu	5,6	4,9	5,0	4,9	5,2
Ikan	4,8	4,7	3,9	4,0	4,3
Sayur+buah	6,1	3,7	6,5	6,3	3,7
Makanan dan minuman jadi	10,4	10,3	10,5	11,4	12,6
Non Pangan	46,1	47,0	50,8	49,8	49,4
Perumahan+fasilitas RT	19,0	22,6	20,8	20,2	19,9
Barang+jasa	15,4	15,0	17,0	17,1	17,5
Total pengeluaran (Rp/kap/bulan)	266.753	293.062	353.421	386.370	430.065

Tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat dan juga keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi secara terintegrasi. Selama ini acuan yang digunakan untuk mengetahui apakah energi dan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat sudah terpenuhi atau belum adalah hasil dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi V (WKNPG) yang diselenggarakan oleh LIPI dengan instansi lainnya.

Hasil WNPG ke IX, tahun 2008 menetapkan bahwa angka kecukupan energi (AKE) dan angka kecukupan protein (AKP) masyarakat Indonesia adalah 2000 Kalori/kapita/hari dan 52 gram/kapita/hari. Sampai tahun 2008, konsumsi energi dan protein mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2005. Namun untuk tahun 2009, konsumsi kedua hal tersebut menurun bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2005. Konsumsi energi masyarakat Indonesia masih sedikit di bawah anjuran, sekitar 96,4 persen

dari kebutuhan pada tahun 2009. Berbeda dengan protein, konsumsi zat gizi ini sudah melebihi sekitar 10 persen dari kebutuhan, walaupun kecenderungan per tahunnya sama dengan pola konsumsi energi. Pemenuhan kebutuhan protein masyarakat masih tertumpu pada protein nabati. Pangsa protein hewani baru sekitar 26,6 persen dari total konsumsi protein. Idealnya, pangsa protein hewani minimal 50 persen dari total konsumsi protein untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia yang baik dan mampu bersaing pada tataran global.

Rendahnya konsumsi energi bukan berarti karena tidak adanya pangan di pasaran, karena ketersediaan energi selama 2005-2008 meningkat sebesar 2,6 persen/tahun dan pada tahun 2008 sebesar 3.032 Kalori/kapita/hari⁶. Padahal anjuran kecukupan energi tingkat ketersediaan hanya 2.200 kalori/kapita/hari. Demikian pula untuk protein, tingkat ketersediaannya tahun 2008 sebesar 76,9 gram/kapita/hari dengan laju peningkatan sebesar 2,3 persen/tahun.

Tabel 2
Tingkat Konsumsi Energi dan Protein

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
Energi (Kalori)	1996	1927	2015	2038,2	1927,5
TKE	99,8	96,3	100,7	101,9	96,4
Protein (gram)	55,23	53,66	57,66	57,49	54,36
TKP	106,2	103,2	110,9	110,6	104,5
Hewani (%)	25,2	24,4	26,2	26,6	26,6

Keterangan: TKE = Tingkat Konsumsi Energi; TKP= Tingkat Konsumsi Protein

Dalam mengkonsumsi makanan, aspek yang diperhatikan tidak hanya masalah kuantitas tetapi juga aspek kualitas pangan. Secara kuantitas pangan telah diuraikan terdahulu bahwa konsumsi energi masih sedikit di bawah yang dianjurkan sedangkan untuk protein sudah melebihi dari ketentuan. Bagaimana pola pangan masyarakat dilihat dari aspek kualitas pangan? Selama ini untuk mengukur kualitas pangan yang sekaligus juga keragaman/diversifikasi konsumsi pangan dilakukan dengan memperhatikan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kualitas konsumsi pangan dianggap baik dan terdiversifikasi sempurna apabila skor PPH mencapai 100 dan dapat dikatakan semakin tinggi skor, diversifikasi konsumsi pangan semakin baik. Ketentuan kualitas pangan yang ideal menurut PPH disajikan pada Tabel 3.

Kualitas konsumsi pangan pada tahun 2005 dengan skor PPH sebesar 79,1 dan terus membaik sampai pada tahun 2008 dengan skor 81,9. Namun kualitas konsumsi pangan mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2009 yang ditunjukkan dengan penurunan skor PPH menjadi 75,7. Dikaitkan dengan diversifikasi konsumsi pangan, adalah sangat relevan kalau muncul pertanyaan pangan yang mana yang konsumsinya harus ditambah dan sebaliknya mana yang harus dikurangi? Informasi ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Konsumsi pangan dari kelompok padi-padian yang dianjurkan sebesar 275 gram/kapita/hari, namun masyarakat mengkonsumsi pangan ini berlebihan, sampai mencapai lebih dari 300 gram. Dalam kelompok padi-padian terdapat komoditas padi, jagung dan terigu yang tingkat konsumsinya dapat dilihat pada Tabel 4. Konsumsi beras menunjukkan kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun walaupun dengan laju yang kecil. Walaupun menurun, namun tingkat konsumsi beras masih tinggi yaitu 280,06 gram/kapita/hari atau 100,82 kg/kapita/tahun. Pangsa energi dari beras saja mencapai 51,7 persen dari total konsumsi energi, padahal dalam konsep PPH, pangsa energi dari kelompok padi-padian seharusnya hanya 50 persen. Oleh karena itu, konsumsi beras harus diturunkan, apalagi dengan tantangan kedepan untuk memproduksi beras. Rata-rata konsumsi beras dunia hanya 60 kg/kapita/tahun,

sedangkan Malaysia dan Thailand masing-masing juga hanya 80 kg dan 90 kg/kapita/tahun⁴.

Konsumsi jagung menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu 7,38 persen/tahun selama lima tahun terakhir. Penurunan konsumsi jagung bukan karena ketersediaan jagung yang terbatas, namun lebih karena perubahan pola pangan pokok. Produksi jagung secara nasional pada tahun 2009 mencapai 17,6 juta ton dan menurut neraca produksi dan konsumsi, ketersediaan jagung dari produksi domestik mencapai dua kali lipat dari kebutuhannya⁴.

Ariani (2010) dengan menggunakan data SUSENAS berbagai tahun menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan pokok di Indonesia dari pola yang beragam pangan pokok ke arah pola tunggal dan ke arah beras⁷. Selanjutnya dikatakan masyarakat yang semula mempunyai pola jagung seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sagu di Papua dan Maluku juga sudah ke arah beras. Dalam direktori Badan Ketahanan Pangan (2009) terlihat bahwa rumah tangga yang tingkat pendapatannya di atas Rp.100 ribu/kapita/bulan, pola konsumsi pangan pokoknya sudah pola beras+terigu (termasuk turunannya seperti mi instan)⁸. Sebaliknya pada kelompok pendapatan di bawah Rp.100 ribu/kapita/bulan, masih ditemukan pola pangan pokok yang menggunakan pangan lokal seperti jagung, ubikayu dan sagu.

Konsumsi makanan berbahan baku gandum menunjukkan kenaikan yang signifikan yaitu 6,86 persen/tahun. Berkembangnya mi instan sebagai makanan utama setelah beras didorong oleh kebijakan jaman orde baru yang meng"anak-emas"kan terigu selain beras. Adanya kebijakan impor gandum untuk diproses menjadi tepung di dalam negeri yang berlangsung lama dan subsidi harga terigu oleh pemerintah, maka harga terigu menjadi murah. Harus diakui, makanan berbasis gandum seperti mi instan dan aneka roti/kue telah menjadi bagian hidup masyarakat. Gencarnya kampanye yang intensif melalui berbagai jenis media seperti media elektronik, *product development* yang diperluas dengan harga yang bervariasi dan mudah diperoleh, turut mendorong peningkatan partisipasi konsumsi produk gandum terutama berupa mi dan roti.

Kepala Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan yang dituangkan

dalam Sinar Tani Nonor 3356 (2010) mengemukakan bahwa pada masyarakat perkotaan sudah mulai mengurangi konsumsi beras tetapi sayang beralih ke makanan yang bahan bakunya dari terigu. Dua puluh tahun yang lalu, konsumsi terigu per kapita/tahun hanya 6 kg, sekarang sudah mencapai 17 kg/kapita/tahun. Impor gandum Indonesia sudah mencapai 6 juta ton/tahun setara dengan 24 triliun rupiah⁹.

Berdasarkan data pada Tabel 3, tampaknya hanya dari kelompok padi-padian yang konsumsinya sudah melebihi anjuran PPH, sedangkan untuk kelompok pangan lainnya masih jauh dari cukup. Dengan perubahan pola pangan pokok ke arah beras, maka konsumsi umbi-umbian mengalami penurunan. Kontribusi energi dari umbi-umbian seharusnya sekitar 100 gram baru mencapai 40 gram/kapita/hari. Tingkat konsumsi ubikayu, ubijalar dan umbi lainnya menurun secara signifikan (Tabel 4). Padahal, Indonesia kaya dengan beragam pangan sumber karbohidrat berbasis pangan lokal dengan budidaya yang relatif mudah, tidak memerlukan teknologi yang sulit dan biaya yang murah. Produksi ubikayu dan ubijalar terus meningkat, dengan demikian lagi-lagi penurunan konsumsi umbi-umbian lebih banyak dikarenakan perubahan gaya hidup yang berdampak pada gaya makan. Masih adanya masyarakat termasuk media massa yang menganggap pangan lokal umbi-umbian adalah makanan inferior dan dianggap orang miskin bila mengkonsumsinya maka akan

sulit untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian. Padahal makanan umbi-umbian adalah sangat baik untuk kesehatan karena salah satu faktornya adalah indek glikemiknya yang rendah, sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit diabetes.

Konsumsi pangan hewani dan sayur/buah menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, namun tingkat konsumsinya masih lebih rendah dibandingkan dengan anjuran PPH. Kedua kelompok pangan ini sangat penting peranannya dalam kesehatan manusia dan sekaligus pencapaian kualitas sumberdaya manusia. Apalagi dengan era globalisasi yang terbuka, persaingan dalam berbagai hal antar negara sangat berat.

Seperti terlihat pada Tabel 4, konsumsi pangan hewani dan sayur+buah menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun belum sesuai dengan harapan. Dibandingkan dengan negara lain, konsumsi pangan hewani Indonesia masih rendah. Konsumsi daging di negara Malaysia mencapai 48 kg/kapita/tahun, sedangkan di Filipina sebesar 18 kg/kapita/tahun. Konsumsi telur ayam per kapita per tahun di Indonesia 51 butir, sementara di Malaysia mencapai 279 butir¹⁰. Demikian pula, tingkat konsumsi sayuran dan buah-buahan pada tahun 2009 masing-masing sebesar 49,1 kg dan 22,8 kg per kapita per tahun (Tabel 4). Konsumsi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rekomendasi *Food Agriculture Organisation* (FAO) yaitu masing-masing 75 kg/kapita/tahun¹¹.

Tabel 3
Konsumsi Pangan Masyarakat Menurut Kelompok PPH (Gram/kapita/hari)

Kelompok Pangan	Menurut PPH	2005	2006	2007	2008	2009
Padi-padian	275	319,1	316	316,6	326,0	314,4
Umbi-umbian	100	60,0	50,8	53,0	51,7	40,2
Pangan hewani	150	87,4	81,9	90,8	90,0	84,8
Minyak dan lemak	20	22,4	22,1	23,0	22,8	21,8
Buah/biji berminyak	10	9,1	8,2	8,8	7,6	6,8
Kacang-kacangan	35	25,5	25,8	27,7	24,4	22,4
Gula	30	29,0	24,3	26,2	25,8	23,8
Sayur dan buah	250	223,4	204,7	251,7	241,7	199,5
Lain-lain (bumbu)	-	48,8	40,4	50,7	51,9	53,6
Skor PPH	100	79,1	74,9	82,8	81,9	75,7

Tabel 4
Perkembangan Konsumsi Beberapa Jenis Pangan (Gram/kap/hari)

Jenis Pangan	2005	2006	2007	2008	2009	Laju (%/th)
Sumber Energi						
Beras	288,30	285,04	274,03	287,26	280,06	-0,50
Jagung	9,09	8,34	11,55	8,02	6,07	-7,38
Terigu	23,03	22,60	31,07	30,72	28,28	6,86
Ubikayu	41,19	34,65	37,09	35,32	26,21	-8,39
Ubijalar	10,87	8,71	6,84	7,60	6,56	-11,99
Sagu & umbi lainnya	3,13	2,86	3,33	3,15	2,64	-2,28
Sumber Protein						
Daging	16,10	12,59	17,13	16,21	15,10	1,05
Telur	16,76	15,90	18,58	17,46	17,45	1,71
Susu	3,86	4,05	6,10	5,84	5,36	9,50
Ikan	50,91	48,67	49,01	50,45	46,83	-1,30
Kedelai	21,33	22,76	23,63	21,01	19,66	-2,35
Sumber Vitamin/Mineral						
Sayur	139,13	139,96	158,26	154,3	136,29	0,59
Buah	86,96	64,71	93,41	87,40	63,20	-3,14

Upaya Peningkatan Diversifikasi Pangan

Hasil analisis dari bahasan terdahulu bahwa konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan kuantitas dan keragamannya. Keragaman dari aspek kelompok pangan dan juga komoditas di dalam kelompok tersebut disesuaikan dengan konsep pola pangan harapan (PPH) dan potensi sumberdaya lokal, dalam hal ini dikaitkan dengan tingkat penyediaan pangan. Konsumsi beras dan terigu harus diturunkan, sebaliknya konsumsi pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian ditingkatkan dan peningkatannya harus secara signifikan. Demikian pula untuk konsumsi pangan hewani dan sayur+buah juga masih harus ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai diversifikasi konsumsi pangan sesuai PPH.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pola konsumsi masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan keragamannya baik mencakup pangan pokok maupun untuk jenis pangan lainnya. Diversifikasi pangan juga menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Apalagi apabila mengacu pada konsep gizi bahwa tidak ada satu jenis panganpun yang lengkap zat gizinya sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup sehat. Dari segi fisiologis, manusia untuk dapat hidup aktif dan sehat memerlukan lebih 40 jenis zat gizi yang terdapat pada

berbagai jenis makanan. Tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap gizinya kecuali ASI¹².

Program diversifikasi konsumsi pangan telah ada sejak dahulu, namun dalam perjalannya menghadapi berbagai kendala baik dalam konsep maupun pelaksanaannya. Beberapa kelemahan diversifikasi konsumsi pangan masa lalu adalah: 1) Distorsi konsep ke aplikasi, diversifikasi konsumsi pangan bias pada aspek produksi/ penyediaan, 2) Penyempitan arti, diversifikasi konsumsi pangan bias pada pangan pokok dan energi politik untuk komoditas beras sangat dominan, 3) Koordinasi kurang optimum, tidak ada lembaga yang menangani secara khusus dan berkelanjutan, 4) Kebijakan antara satu departemen dengan departemen lainnya kontra produktif terhadap perwujudan diversifikasi konsumsi pangan, 5) Kebijakan yang sentralistik dan penyeragaman, mengabaikan aspek budaya dan potensi pangan lokal, 6) Riset diversifikasi konsumsi pangan masih lemah, bias pada beras, terpusat di Jawa-Bali, Fokus pada *on-farm*, dana hanya dari pemerintah pusat, 7) Ketiadaan alat ukur keberhasilan program, program bersifat partial tidak berkelanjutan dan tidak memiliki target kuantitatif yang disepakati bersama 8) Kurangnya kemitraan dengan swasta/industri dan LSM, 9) Ketidakseimbangan perbandingan

antara biaya pengembangan dan harga produk alternatif dengan beras^{12,13,14}.

Dalam rangka mendorong mwujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelestarian sumberdaya alam maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal, dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan¹⁵. Sasaran dari peraturan tersebut adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang

dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata nasional 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015. sasaran skor di setiap provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada sasaran nasional dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumberdaya pangan lokal.

Dalam Peraturan Presiden nomor 22 terdapat strategi pencapaian diversifikasi konsumsi pangan dan siapa melakukan apa dari masing-masing lembaga departemen maupun non departemen. Secara ringkas kegiatan dan dampaknya dari masing-masing kegiatan seperti pada Tabel 5.

Tabel 5
Kegiatan, Keluaran, Dampak dan Sasaran PP No. 22, 2009

No	Kegiatan	Dampak	Sasaran
1	Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan : Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang (3B) dan aman pada berbagai tingkatan aparat dan masyarakat Pendidikan konsumsi pangan sesuai 3B dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya permintaan aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan terigu; pangan sumber protein, serat, vitamin dan mineral • Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman 	Tahap I : (2009-2011), pencapaian skor PPH = 88,1 dan pangan aman dikonsumsi Tahap II (2012-2015), skor PPH = 95 dan pangan aman dikonsumsi
2	Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal Fasilitasi UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal Adokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu fdan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumahtangga dan UMKM	Peningkatan pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumberdaya lokal	
3	Evaluasi dan Pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Sinergi pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dis etiap tingkatan	

Untuk menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 22, 2009 dan mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis potensi sumberdaya lokal, Kementerian Pertanian menetapkan Gerakan percepatan penganekragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal yang dituangkan dalam

Peraturan Kementerian Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/2009¹⁶. Gerakan ini merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian di pusat dan daerah.

Dalam peraturan No.43 ini telah diatur tata kerja dan peranan dari masing-masing unit kerja eselon I yang pelaksanaannya dikoordinir oleh

Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Kementerian Pertanian secara konsisten untuk meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat dengan menetapkan Diversifikasi Pangan sebagai salah satu dari empat program utama yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014. Bekerja sama dengan KOWANI, Menteri Pertanian mencanangkan "Gerakan Hari Tanpa Nasi", yang dikenal dengan *one day no rice*.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan atau program berkaitan dengan upaya peningkatan diversifikasi pangan. Belajar dari pengalaman masa lalu, konsistensi dari semua lembaga terkait termasuk lembaga legislatif dan media (koran, TV, radio, dll) secara berkelanjutan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Dengan persamaan persepsi, gerak langkah yang tepat dan konsisten dalam implementasinya, maka upaya diversifikasi pangan akan terwujud.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin membaik yang ditunjukkan dengan pangsa pengeluaran pangan yang semakin kecil. Konsumsi protein masyarakat sudah melebihi dari yang dianjurkan, sebaliknya untuk konsumsi protein. Pola konsumsi pangan masyarakat sudah semakin beragam dengan skor PPH yang semakin besar. Namun untuk menuju pola pangan PPH, konsumsi beras harus dikurangi, sebaliknya untuk umbi-umbian, pangan hewani dan sayur+buah masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Pemerintah telah menetapkan berbagai instrumen untuk tercapainya diversifikasi pangan seperti Peraturan Presiden Nomor 22, 2009 tentang Kebijakan Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan tindak lanjutnya oleh Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43, 2009 terkait dengan gerakannya. Belajar dari pengalaman masa lalu, konsistensi dari semua lembaga terkait termasuk lembaga legislatif dan media (koran, TV, radio, dll) secara berkelanjutan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Dengan persamaan persepsi, gerak langkah yang tepat dan

konsisten dalam implementasinya, maka upaya diversifikasi pangan akan terwujud.

RUJUKAN

1. Dewan Ketahanan Pangan. Indonesia Tahan Pangan dan Gizi 2015. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, 2009.
2. Kementerian Pertanian. Kinerja Pembangunan Sektor Pertanian 2009. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2010.
3. Haryono. Dampak dan Strategi Mitigasi dan Adaptasi Pertanian terhadap Perubahan Iklim Global. Makalah pada Seminar Nasional Era baru Pembangunan Pertanian: Strategi Mengatasi Masalah pangan, Bio-Energi dan Perubahan Iklim 25 November. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2010.
4. Hadi, P.U dan Sri.H.S.2010. Prospek, Maslahan dan Strategi pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok. Makalah dalam Seminar Nasional Era baru Pembangunan Pertanian: Strategi Mengatasi Masalah pangan, Bio-Energi dan Perubahan Iklim. 25 November. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2010.
5. Kementerian Pertanian. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2009.
6. Ariani,M. Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok untuk Mendukung Swasembada Beras. Makalah pada Seminar Nasional Hasil Penelitian Tanaman Serealia, 27-28 Juli. Makasar: s.n, 2010.
7. Ariani, M. Akses Pangan. Evaluasi Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010. Bogor, s.n, 2010.
8. Badan Ketahanan Pangan. Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2009.
9. Badan Ketahanan pangan. Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2010.
10. Yudohusodo,S. Abad Pertarungan Talenta. Kompas, 27 Januari 2006. hal. 4. Jakarta
11. Irawan,B; H.Tarigan; B.Wiryono; J.Hestina dan Ashari. Kinerja pembangunan Komoditas Hortikultura 2006 dan Prospek

2007. Makalah pada seminar Nasional Kinerja Pembangunan Pertanian 2006 dan prospek 2007. Jakarta. 20 November.
12. Martianto, D. Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan. Makalah pada Seminar Pengembangan Diversifikasi Pangan, Bappenas. 21 Oktober 2005.
 13. Ariani, M dan Ashari. 2003. Arah, Kendala dan Pentingnya Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia. Forum Agro Ekonomi. 2003: 21 (2)
 14. Krisnamurthi, B. Penganekaragaman Pangan: Pengalaman 40 tahun dan Tantangan ke Depan. Jurnal Ekonomi Rakyat 2003, (7).
 15. Dewan Ketahanan Pangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, 2009.
 16. Badan Ketahanan Pangan. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/Ot.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2009.